

*Bisnis Indonesia* - JAKARTA 24 maret 2009 : BP Migas segera mengeluarkan surat jaminan pasokan gas bagi industri pupuk nasional untuk memberikan kepastian produksi. Jaminan pasokan tersebut akan diberikan untuk jangka waktu setidaknya 20 tahun.

Surat jaminan dari BP Migas ini merupakan permintaan dari kalangan perbankan yang akan terlibat dalam pembiayaan program restrukturisasi pabrik pupuk nasional sebagai upaya mengeliminasi kemungkinan kredit macet. Selama ini kalangan perbankan ragu mengucurkan pinjaman untuk pendirian pabrik pupuk karena khawatir aktivitas produksinya terhenti akibat ketiadaan pasokan gas seperti pernah dialami PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), PT Pupuk Kujang Cikampek (PKC) dan PT Asean Aceh Fertilizer (AAF) yang sekarang dalam proses penjualan aset setelah resmi dilikuidasi. "Pasokan gas untuk pabrik pupuk menjadi concern perbankan. BP Migas tidak lama lagi akan mengeluarkan itu [jaminan pasokan gas]," kata Menperin Fahmi Idris, baru-baru ini.

Menperin memastikan program revitalisasi pabrik pupuk tetap berjalan sesuai dengan rencana dan akan direalisasikan pada 2011. Proyek tersebut mencakup penggantian mesin pabrik yang sudah tidak efisien. Mesin produksi yang tidak efisien itu antara lain diindikasikan oleh konsumsi gas yang mencapai 33 juta Btu (British thermal unit) untuk memproduksi setiap ton urea. Proses produksi dikategorikan normal jika untuk memproduksi 1 ton urea dibutuhkan gas tidak lebih dari kisaran 26 juta Btu.

Melalui program revitalisasi ini, kapasitas produksi urea nasional diharapkan naik menjadi 10,7 juta ton. Saat ini, dari 20 unit pabrik pupuk yang ada, 10 di antaranya berumur lebih dari 20 tahun, enam pabrik berumur 10 tahun lebih dan hanya empat pabrik yang berumur di bawah 10 tahun. Dalam program revitalisasi pabrik pupuk ini, pemerintah menganggarkan dana sekitar Rp49,01 triliun. "Gas merupakan komponen penting untuk memproduksi pupuk. Berdasarkan pengalaman, beberapa produsen kesulitan memperoleh pasokan gas. Selain karena keterbatasan pasokan, harganya juga terlalu tinggi," ujarnya.

Berbeda dengan Menperin, Ketua Umum Dewan Pupuk Indonesia Zaenal Soedjais pesimistis program revitalisasi dapat berjalan sesuai dengan rencana. Alasannya, pemerintah tidak bisa dengan mudah memberikan jaminan pasokan gas selama 20 tahun seperti diinginkan perbankan mengingat volume gas yang dapat dialirkan ke pabrik pupuk semakin terbatas. Menurut dia, keengganan perbankan nasional mengucurkan kredit restrukturisasi dengan alasan tidak ada jaminan pasokan gas, semata-mata hanya argumentasi yang dibuat-buat. "Itu hanya alasan, karena sebenarnya mereka [perbankan] tidak sanggup mendanai proyek revitalisasi."

Oleh Yusuf Waluyo Jati